



SKRIPSI:

**Analisa Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
(Studi Kasus Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Illegal Fishing Di
Kepulauan Kapoposang Sulawesi Selatan Periode 2018-2020)**

Nama :Atiqah Shabrina Adani

NIM :1710413001



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

2021



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik**

**Analisa Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
(Studi Kasus Upaya Pemerintah Dalam Memberantas *Illegal Fishing* Di Kepulauan
Kapoposang Sulawesi Selatan Periode 2018-2020)**

ATIQA SHABRINA ADANI

1710413001

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NEGERI VETERAN JAKARTA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PRODI ILMU POLITIK

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang di kutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar:

Nama : Atiqah Shabrina Adani

NIM : 1710413001

Program Studi : Ilmu Politik

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 16 Juli 2021

Yang menyatakan,



(Atiqah Shabrina Adani)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atiqah Shabrina Adani
NIM : 1710413001
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisa Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Illegal Fishing Di Kepulauan Kaposang Sulawesi Selatan Periode 2018-2020)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Juli 2021
Yang Menyatakan,



(Atiqah Shabrina Adani)

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama :Atiqah Shabrina Adani

NIM :1710413001

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Analisa Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Upaya Pemerintah Dalam Memberantas *Illegal Fishing* Di Kepulauan Kapoposang Sulawesi Selatan Periode 2018-2020)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pembimbing Utama



Jerry Indrawan, S.IP, M.Si

Pembimbing Pendamping



Muhammad Prakoso Aji, S.Sos., M.I.P

Ketua Program Studi



Anwar Ilmar, S.sos., M.IP

**ANALISA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN (STUDI KASUS UPAYA PEMERINTAH DALAM
MEMBERANTAS ILLEGAL FISHING DI KEPULAUAN KAPOPOSANG
SULAWESI SELATAN PERIODE 2018-2020)**

ATIQA SHABRINA ADANI

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, maka dari itu negara Indonesia disebut dengan negara maritim. Luasnya perairan Indonesia rentan terhadap kasus-kasus pencurian serta perusakan ekosistem perairan. Salah satu kasus perairan Indonesia yaitu Illegal fishing merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh kapal asing maupun kapal dalam negeri yang mengacu pada Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang perikanan. salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kerusakan ekosistem perairan dengan membuat kawasan konservasi perairan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tidak terjadi kasus illegal fishing. Seperti kasus yang penulis teliti di Kawasan konservasi Taman Wisata Perairan Kapoposang di Sulawesi Selatan pada tahun 2018-2020 yang masih terjadi pelanggaran tindak penangkapan ikan secara illegal. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dalam memberantas kasus illegal fishing di kepulauan Kapoposang Sulawesi Selatan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan teori kebijakan publik dari William I. Jenkins. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode analisis kebijakan, yang dapat membantu penulis dalam mendefinisikan masalah kebijakan dengan cara menganalisis data dan informasi yang relevan dengan kasus yang diteliti, serta melakukan wawancara mendalam dengan narasumber. Penelitian ini membahas bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus illegal fishing di kepulauan Kapoposang mengacu pada implementasi Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

Kata Kunci: Illegal Fishing, Destructive Fishing, Implementasi Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Kawasan Konservasi Perairan

ANALYSIS IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 45 OF 2009 CONCERNING FISHERIES (A CASE STUDY OF THE GOVERNMENT'S EFFORTS IN COMBATING ILLEGAL FISHING IN KAPOPOSANG ISLAND, SOUTH SULAWESI FOR THE 2018-2020 PERIOD)

ATIQA SHABRINA ADANI

ABSTRACT

Indonesia is an archipelagic country with most of its territory in the form of waters, therefore the Indonesian state is called a maritime country. The extent of Indonesian waters is vulnerable to cases of theft and destruction of aquatic ecosystems. One of the cases in Indonesian waters, namely Illegal fishing, is a crime committed by foreign ships and domestic ships which refers to Law 45 of 2009 concerning fisheries. One of the government's efforts in overcoming the damage to aquatic ecosystems is to create a water conservation area. However, it does not rule out cases of illegal fishing. As in the case that the author studied in the Kapoposang Aquatic Tourism Park conservation area in South Sulawesi in 2018-2020, there were still violations of illegal fishing. The research question posed is how to implement Law No. 45 of 2009 on fisheries in eradicating cases of illegal fishing in the Kapoposang islands, South Sulawesi. To answer this research question, the author uses the public policy theory of William I. Jenkins. This study uses qualitative descriptive methods and policy analysis methods, which can assist the author in defining policy problems by analyzing data and information relevant to the case under study, as well as conducting in-depth interviews with informants. This study discusses how the government's efforts in handling illegal fishing cases in the Kapoposang Islands refer to the implementation of Law 45 of 2009 concerning fisheries.

Keywords: Illegal Fishing, Destructive Fishing, Implementation of Law 45 of 2009 concerning Fisheries, Marine Protected Area

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul Analisa Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Illegal Fishing Di Kepulauan Kapoposang Sulawesi Selatan Periode 2018-2020). Skripsi ini menjadi suatu bukti bahwa mahasiswa telah menuntaskan kuliah jenjang program Strata-1 dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik.

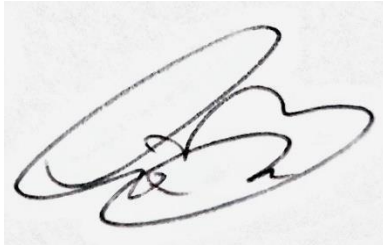
Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa ada dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, penulis diberikan kesehatan dan kesempatan dalam menyelesaikan Skripsi ini hingga selesai.
2. Kedua Orang Tua yaitu Ayah dan Ibu serta kedua kakak yang telah memberikan do'a serta dukungan baik moral maupun materi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Anwar Ilmar, S.sos., M.IP sebagai Kaprodi Ilmu Politik FISIP UPN "Veteran" Jakarta.
4. Bapak Jerry Indrawan, S.Ip., M.Si selaku dosen pembimbing 1, dan juga Bapak M. Prakoso Aji. S.Sos., M.IP selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan kritik dan masukan-masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Prodi Ilmu Politik FISIP UPN 'Veteran' Jakarta;
6. Para Narasumber yang sudah membantu dan bersedia untuk di wawancara
7. Kerabat dekat penulis yaitu Laras, Caca, Ninda, Keke, Claresta, Rahma, Ica, Hanun, Une, Putri dan Adit yang telah mendukung dan membantu serta memberikan Do'a selama menyelesaikan Skripsi.
8. Rekan-rekan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta Angkatan 2017;
9. Serta seluruh pihak dan khususnya orang-orang terdekat penulis yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini melalui dukungan moral dan semangat;

Dukungan yang diberikan oleh semua pihak yang telah penulis sebutkan sangat berarti dan berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam

penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi menambah wawasan dan pengetahuan, penulis sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang bersifat membangun hingga lebih sempurna. Penulis juga berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 16 Juli 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Atiqah Shabrina Adani', written in a cursive style.

(Atiqah Shabrina Adani)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori dan Konsep.....	21
2.2.1 Kebijakan Publik	21
2.3 Definisi Konseptual	23
2.3.1 Illegal Fishing	23
2.3.2 Impelentasi Kebijakan	24
2.4 Kerangka Berpikir	28

BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Sumber Data.....	30
3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data.....	31
3.4 Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	32
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN.....	34
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	34
4.1.1 Kementerian Kelautan dan Perikanan	34
4.1.2 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.....	36
4.1.3 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang.....	36
4.1.4 Taman Wisata Perairan Kapoposang	37
4.2 Hasil Penelitian.....	38
4.2.1 Data Kasus <i>Illegal Fishing</i> Di Taman Wisata Perairan Kapoposang Tahun 2018 Hingga 2020	38
4.2.2 Kesenjangan Sosial Pada Masyarakat Kapoposang.....	54
4.2.3 Kurangnya Anggaran Pengawasan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Kapoposang.....	57
4.2.4 Kurangnya Koordinasi Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Menangani Kasus <i>Illegal Fishing</i> Di Taman Wisata Perairan Kapoposang.....	59
4.3 Pembahasan.....	63
4.3.1 Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pada Kasus <i>Illegal Fishing</i> Di Taman Wisata Perairan Kapoposang.....	63
4.3.1.1 Tindakan Preventif.....	71
4.3.1.2 Tindakan Represif.....	76

BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Letak Geografi Kepulauan Spermode	42
Gambar 2. Pengelolaan dan Zonasi TWP Kepulauan Kapoposang	45
Gambar 3. Kegiatan Penangkapan Illegal Fishing di TWP Kapoposang Tahun 2019.....	51
Gambar 4. Penangkapan Pelaku Illegal Fisihing TWP Kapoposang Tahun 2020 oleh PSDKP.....	52
Gambar 5. Barang Bukti Bahan Pembiusan Ikan oleh Pelaku Illegal Fishing	53
Gambar 6. Kegiatan Pelaksanaan Program Goes To School di TWP Kapoposang Tahun 2019	73
Gambar 7. Kegiatan Pelaksanaan Program Goes To School di TWP Kapoposang Tahun 2018	74

DAFTAR TABEL

Tabel 3.4 Waktu Kegiatan Penelitian	33
Tabel 4.2.1 Kasus Illegal Fisihing di TWP Kapoposang Tahun 2018-2020	47

DAFTAR SINGKATAN

TWP Kapoposang	: Taman Wisata Perairan Kapoposang
BKKPN	: Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
KKPN	: Kawasan Konservasi Perairan Nasional;
KKP	: Kementrian Kelautan dan Perikanan
UU	: Undang-Undang
UPT	: Unit Pelaksanaan Teknis
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PWP3K	: Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Polsus	: Polisi khusus
PSDKP	: Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Wilker	: Wilayah Kerja
GTS	: Goes To School
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
SATKER	: Satuan Kerja
POLAIR	: Polisi Perairan
ABK	: Awak Buah Kapal
SIPI	: Surat Izin Penangkapan Ikan
GT	: Gross Tonage / Volume Kapal
WPP	: Wilayah Pengelolaan Perikanan